



LAPORAN AKTUALISASI

**OPTIMALISASI PENGGUNAAN ANGGARAN PERJALANAN DINAS
DI BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET (BPKAD)
KABUPATEN BINTAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

DISUSUN OLEH :

NAMA : NENY PERDANASARI, S.IP
NIP : 19941107 201708 2 001
KELAS : A2
NO. ABSEN : 22

**PELATIHAN DASAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL GOL. III
BAGI PURNA PRAJA IPDN ANGGARAN XXIV
GELOMBANG I**

**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
2018**

DESKRIPSI SINGKAT

Perjalanan dinas merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh ASN dalam mendukung kinerja pemerintah. Pemerintah Daerah dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah melaksanakan urusan pemerintahan yang terdiri dari urusan pemerintahan konkuren, urusan pemerintahan absolut, dan urusan pemerintah umum. Dalam menjalankan roda pemerintahan, diperlukan kegiatan perjalanan dinas untuk mendukung lancarnya program kerja setiap pemerintah daerah. Dalam hal ini, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan sarana pendanaan untuk mewujudkan rencana kerja pemerintah.

Dalam hal ini, penulis melaksanakan beberapa kegiatan yang selanjutnya dalam kegiatan tersebut memiliki beberapa output yang penulis harapkan. Penulisan ini bertujuan agar menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah dan ASN agar menggunakan anggaran daerah dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggungjawab serta dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam penulisan Laporan Aktualisasi ini, penulis memiliki beberapa faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukung yang penulis alami adalah pedoman pada Peraturan Bupati Bintan Nomor 88 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Bagi Pejabat, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Non PNS Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan dan Keputusan Bupati Bintan Nomor 2/1/2018 Tentang Penetapan Standar Biaya Perjalanan Dinas Kabupaten Bintan serta bimbingan dari Role Model dalam penyelesaian Laporan Aktualisasi ini. Faktor penghambat yang penulis dapatkan adalah kelengkapan data-data yang penulis dapatkan belum relevan.